

## KAJIAN PUPUK BERSUBSIDI DI PEKALONGAN (Studi Kasus di Kecamatan Kesesi)

Wahyu Ardiyanto, Purbayu Budi Santoso<sup>1</sup>

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone : +622476486851

### ABSTRACT

*This study aims to assess the effectiveness of the fertilizer subsidy policy to support rice production with a case study on Kesesi District Pekalongan. Sampling method using purposive sampling where the selection of respondents based on consideration of the research supporting data. The research sample is the entire village in the district by the number of respondents Kesesi 100 farmers. Determination of the number of respondents is based on calculations using formulas Slovin. The analytical method used is descriptive qualitative and quantitative methods, and methods of descriptive statistics. Descriptive qualitative and quantitative methods are used to measure the effectiveness of the fertilizer subsidy policy by using two main indicators, namely the right price and the right amount. While the descriptive statistical method used to determine the proportion of the various financing farmers in one growing season and to determine the amount of net income received by farmers in a single growing season.*

*Results of this study showed that the fertilizer subsidy policy is considered not effective based on the price of subsidized fertilizer level retailers, the results showed 72.19 percent of farmers buy fertilizer at a price above the prevailing HET. Later than HET in terms of the use of fertilizers by farmers are also not in accordance with the recommendations of balanced fertilization. Penelitian results showed 62 percent of farmers use fertilizer farmers are still under the recommendation and 12 percent above the recommended recommendations. It can affect farmers' expenditure, in which case the proportion of research expenditure in the amount of fertilizer farmers 11 percent. These expenses are the second largest expense after labor expenses, it will indirectly affect the income of farmers. Amount of expenditure will reduce the amount of revenue that would diiterima farmers. Based on our research the average net income once the growing season of 100 respondents with an average of 3350,1 m<sup>2</sup> of land amounting to Rp 3,899.585.*

*Keywords: Agriculture, Fertilizer Subsidy Policy*

### PENDAHULUAN

. Pembangunan sektor pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah kebutuhan akan pangan secara langsung juga akan ikut bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat menuntut petani untuk meningkatkan produksinya. Dengan peningkatan produksi pertanian diharapkan kesejahteraan petani juga akan meningkat.

Pupuk telah senantiasa berada di lini depan dalam usaha untuk meningkatkan produksi pangan dunia dan mungkin lebih dari pada jenis input yang lain, secara luas bertanggung jawab bagi keberhasilan yang telah dicapai. Hanya tanah-tanah yang subur yang merupakan tanah produktif. Apabila hara tanaman rendah, produktifitas tanah dan hasil tanaman rendah. Jadi dengan memasok hara tanaman yang esensial bagi produksi tanaman yang tinggi, pupuk telah menjadi vital untuk produksi tanaman (Melda R. Sirait, 2008).

Mengingat peranan pupuk yang sangat strategis, maka penyediaan pupuk dengan harga yang terjangkau oleh petani merupakan masalah yang krusial. Oleh karena itu, harga pupuk tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya karena harga pupuk yang tercipta

---

<sup>1</sup> Penulis Penanggung Jawab

kemungkinan besar tidak terjangkau oleh petani. Sehubungan dengan hal ini, maka pemerintah masih merasa perlu untuk memberikan subsidi harga terhadap penyediaan pupuk melalui penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), atau dikenal juga dengan istilah "Ceiling Price". Sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pertanian Nomor 87 / Permentan/SR.130/12/2011 tentang kebutuhan pupuk bersubsidi dan HET pupuk bersubsidi, pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan HET di tingkat pengecer resmi.

Namun pada kenyataannya petani sebagai penerima manfaat program ini masih sulit untuk mengaksesnya. Petani kerap kali menemukan pupuk langka, harga pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk. Padahal berdasarkan regulasi saat ini, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi telah ditetapkan dan ditataniagakan dengan HET melalui penyaluran resmi.

Padi merupakan komoditi unggulan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan data BPS menunjukan dari tahun 2009 sampai tahun 2010 untuk tanaman padi sawah mengalami peningkatan luas panen sebesar 15,59 persen. Kenaikan luas panen tersebut memberi dampak terhadap naiknya produksi padi sebesar 24,81 persen. Penggunaan input dan sistem pertanian yang tepat merupakan salah satu kunci keberhasilan kenaikan tersebut, terutama dalam penggunaan pupuk berimbang menjadi salah satu tolok ukur efisiensi dari proses produksi pertanian padi sawah. (Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2010). Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang potensial di Kabupaten Pekalongan.

Di dalam PDRB sektor pertanian kabupaten Pekalongan menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sektor industri. Berdasarkan Tabel 1 sektor pertanian menyumbang 19,90 persen pada tahun 2009, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2010 menjadi 20,71 persen. Dibandingkan dengan sektor lain sektor pertanian mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 0,81 persen.

**Tabel 1**  
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2010**

Sektor	2009	2010
Pertanian	19,90 %	20,71 %
Pertambangan dan Penggalian	1,04 %	0,96 %
Industri Pengolahan	27,25 %	26,85 %
Listrik, Gas dan Air Bersih	1,38 %	1,36 %
Konstruksi	6,20 %	6,13 %
Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,76 %	18,68 %
Pengangkutan dan Komunikasi	3,80 %	3,84 %
Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	4,80 %	4,75 %
Jasa-jasa	16,87 %	16,72 %
Total	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Pekalongan 2010

Akan tetapi pembangunan pertanian di Kabupaten Pekalongan tidak lepas dari adanya masalah yang dihadapi salah satunya yaitu, masalah pupuk bersubsidi. Mengutip dari harian Suara Merdeka edisi Senin tanggal 3 Oktober 2005 harga sarana produksi padi (saprodi) baik pupuk maupun obat-obatan selama ini belum sesuai dengan harga eceran sebagaimana ketentuan pemerintah. Harga pupuk ataupun obat-obatan sering tak sesuai dengan harga dasar yang diatur pemerintah. Seperti jenis pupuk bersubsidi, harga dasar urea yang ditetapkan pemerintah Rp 105.000/kuintal dalam praktiknya Rp 120.000 - Rp150.000/kuintal. Lebih parah lagi petani tidak tahu berapa harga eceran obat-obatan saat ini menurut ketetapan pemerintah.

Berdasarkan survey yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan menunjukan harga di tingkat pengecer selalu mengalami kenaikan. Selain itu harga tersebut masih di atas HET yang berlaku pada masing-masing tahun, rata-rata besarnya selisih yaitu Rp 120/Kg dari masing-masing tahun. Salah satu hal yang menjadi alasan bagi pengecer menaikkan harga secara tidak resmi adalah untuk mendapatkan margin pemasaran dari pengecer dan biaya pemasaran karena harga pupuk bersubsidi yang kurang realistik. Kenaikan harga ini akan merugikan petani karena harga pupuk bersubsidi di pasar lebih tinggi dari HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

Disamping masalah harga pupuk bersubsidi masalah lain yaitu dosis penggunaan pupuk oleh petani yang tidak sesuai dengan aturan pemupukan berimbang. Mengutip dari harian Suara

Merdeka edisi Jumat 5 Desember 2008 Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan Haryanto di Pekalongan mengatakan, dari hasil penelitian kebutuhan pupuk urea bersubsidi dalam satu hektare lahan mencapai 250 kg-300 kg tetapi mereka cenderung berlebihan menggunakan pupuk dua kali lipat dari jumlah itu. Beliau juga menerangkan "Saat ini, para petani cenderung melakukan pemupukan tanaman padi hingga mencapai 400-500 kilogram sehingga kebutuhan pupuk melonjak. Padahal pemakaian pupuk secara berlebihan juga bisa menimbulkan tanah tidak subur".

Berdasarkan data BPS, Kecamatan Kesesi merupakan penyumbang produksi padi terbesar di Kabupaten Pekalongan. Dengan luas panen sebesar 8.662 Ha dapat menghasilkan produksi padi sebesar 46.861 ton, jika dihitung rata-rata per Hektar dapat menghasilkan 5,4 ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa lahan sawah di Kecamatan Kesesi mempunyai produktifitas yang cukup tinggi. Dari segi sarana prasarana pendukung produksi padi kecamatan Kesesi cukup bagus yaitu tersedianya sistem irigasi teknis dan sarana prasarana pendukung lainnya. Selain itu input produksi merupakan salah satu penentu dari proses produksi, misalnya pupuk.

Tingginya produksi lahan sangat tergantung dengan penggunaan input dan tersedianya sarana prasarana pendukung. Semakin luas lahan sawah garapan maka kebutuhan akan input terutama pupuk juga akan semakin tinggi.

Berdasarkan Tabel 1.7 data Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan jumlah kebutuhan pupuk di Kecamatan Kesesi sebesar 2.558 ton untuk pupuk urea, angka tersebut merupakan angka terbesar diantara 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan, sedangkan alokasi untuk pupuk ZA yaitu sebesar 180 ton, 689 ton untuk SP-36, 1.678 ton untuk pupuk NPK (pupuk Majemuk), dan 348 ton untuk pupuk Organik.

**Tabel 2**  
**Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Pekalongan tahun 2012**  
Satuan Ton

No.	Kecamatan	Urea	ZA	SP-36	NPK	Organik
1.	Kandangserang	824	14	132	35	85
2.	Peninggaran	1.166	11	124	157	156
3.	Lebakbarang	390	1	3	37	13
4.	Petungkriyono	301	1	16	68	19
5.	Talun	871	23	202	334	119
6.	Doro	1.567	95	322	752	231
7.	Karanganyar	1.256	138	607	770	164
8.	Kajen	1.581	901	1.270	2.415	504
9.	<b>Kesesi</b>	<b>2.558</b>	<b>180</b>	<b>689</b>	<b>1.678</b>	<b>348</b>
10.	Sragi	1.670	267	322	1.309	433
11.	Siwalan	1.004	30	154	199	495
12.	Bojong	1.630	215	202	703	114
13.	Wonopringgo	849	80	144	270	125
14.	Kedungwuni	1.096	73	127	205	32
15.	Karangdadap	1.052	100	177	302	392
16.	Buaran	603	1	38	84	13
17.	Tirto	794	206	229	292	29
18.	Wiradesa	912	425	186	781	116
19.	Wonokerto	993	1	80	168	49

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan

Besarnya kebutuhan input pupuk tersebut dapat memunculkan berbagai masalah, diantaranya yaitu tingkat harga jual pupuk bersubsidi yang meningkat lebih tinggi dari HET yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena tingginya permintaan akan pupuk bersubsidi. Tingginya harga pupuk akan sangat memberatkan petani dalam biaya produksinya, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan bersih yang akan diterima oleh petani tersebut.

Selain itu dari sisi petani adanya kebiasaan penggunaan pupuk urea yang berlebihan dapat mengurangi tingkat efisiensi biaya produksi, dari Tabel 2 menunjukkan penggunaan jenis pupuk terbesar oleh petani di kecamatan Kesesi yaitu jenis pupuk urea dengan angka alokasi sebesar 2.558 ton, angka tersebut merupakan angka terbesar diantara 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut menunjukkan petani masih beranggapan bahwa pupuk urea merupakan

pupuk pokok dan mutlak diperlukan, sementara pupuk lainnya seperti SP36 dan NPK hanya merupakan pupuk pelengkap. Kebutuhan pupuk urea bersubsidi dalam satu hektare lahan mencapai 250 kilogram-300 kg tetapi mereka cenderung berlebihan menggunakan pupuk dua kali lipat dari jumlah itu.

Bustanul Arifin (2004) menyatakan persoalan besar yang dihadapi petani Indonesia saat ini adalah kelangkaan dan menghilangnya pupuk di beberapa daerah, karena terdapat kesenjangan (*gap*) antara jumlah kebutuhan dan pasokan pupuk. Masalahnya kelangkaan pupuk berkaitan dengan faktor disparisasi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga aktual di lapangan, ketidaktepatan subsidi dan persoalan internal dalam industri pupuk seperti efisiensi, penentuan harga pokok penjualan dan budaya perusahaan perlu juga diperhatikan.

Pemerintah, Produsen, Distributor dan Pengecer merupakan lembaga yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan juga berperan penting dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Jika pengadaan dan penyaluran pupuk tidak memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu (1) tepat jenis, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat tempat, (5) tepat waktu, (6) tepat mutu, maka upaya ketahanan pangan nasional tidak akan tercapai. Untuk itu diharapkan realisasi peraturan pupuk di jadikan patokan bagi produsen, distributor dan pengecer (Adnyana dan Kariyasa, 2000).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas kebijakan subsidi pupuk berdasarkan indikator tepat harga dan tepat jumlah, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis proporsi pengeluaran petani dan untuk menganalisis tingkat pendapatan setiap masa panen petani di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

#### **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Menurut Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2012, pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

Pupuk mengandung bahan baku pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme. Pupuk juga dapat diartikan sebagai bahan alami atau buatan yang mengandung unsur-unsur kimia yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pupuk dapat meningkatkan kesuburan alami tanah atau mengganti unsur-unsur kimia yang sebelumnya yang diambil dari tanah oleh tanaman. Dalam kandungan pupuk memiliki satu atau lebih dari tiga unsur penting atau unsur primer dalam nutrisi tanaman yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan unsur sekunder yaitu sulfur, magnesium dan kalsium.

Pupuk diberikan agar tanaman dapat tumbuh berkembang dan menghasilkan sesuai yang diharapkan. Manusia selalu menuntut lebih terhadap kemampuan tanaman. Rekayasa genetik dan lingkungan dilakukan agar tanaman dapat memberikan kinerja yang lebih baik.

Menurut Melda R. Sirait (2008) menjelaskan bahwa pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur untuk menggantikan unsur yang habis terhisap oleh tanaman. Jadi, memupuk berarti menambah unsur hara ke dalam tanah (pupuk akar) dan tanaman (pupuk daun).

Secara filosofis, subsidi pupuk dilakukan untuk membantu meringankan beban petani dalam membiayai usaha taninya. Selain persoalan biaya, petani juga menghadapi persoalan kemampuan dalam mengadopsi teknologi pemupukan untuk peningkatan produktifitas. Sehingga diperlukan terobosan program untuk mengatasi hal ini sebagai upaya peningkatan komoditas pertanian untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan. Upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk mendukung peningkatan produktifitas hasil pertanian melalui teknologi pemupukan adalah program pupuk bersubsidi.

Peraturan pupuk bersubsidi untuk kabupaten Pekalongan diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012. Peraturan ini membahas tentang penyaluran pupuk bersubsidi untuk pertanian dan perikanan di Kabupaten Pekalongan. Selain itu peraturan ini juga membahas tentang pengertian istilah-istilah yang terkait dengan subsidi pupuk. Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik.

Agar program pupuk bersubsidi tepat sasaran maka pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 77

Tahun 2005. Artinya peredaran pupuk bersubsidi berada dalam pengawasan pihak-pihak terkait, dan terdapat sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Secara umum, pengadaan dan distribusi pupuk diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 21/M-DAG/PER/6/2008 *juncto* No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Sektor pertanian yang dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan atau Udang.

Kebijakan subsidi pupuk untuk sektor pertanian berupa penetapan HET pada pupuk. Penetapan HET ini bertujuan untuk membantu biaya produksi pertanian. Penelitian ini fokus pada produksi padi. Untuk mengukur efektifitas kebijakan subsidi pupuk terdapat 6 indikator yang dapat digunakan, namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah indikator tepat harga dan tepat jumlah. Indikator tepat harga dapat dilihat berdasarkan kesesuaian harga pupuk bersubsidi yang dibeli petani dengan HET yang ditetapkan pemerintah, untuk indikator tepat jumlah dapat dilihat berdasarkan penggunaan pupuk oleh para petani di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Kemudian bagaimana pengaruh kedua hal tersebut terhadap pendapatan yang didapatkan petani setiap masa panen. Dari berbagai biaya berapa besar biaya yang digunakan oleh petani untuk membeli pupuk.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan penulis adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan, Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan. Sedangkan data primer diperoleh dari wawancara kepada petani-petani di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sebagai responden.

### Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian padi dan palawija tahun 2011 yaitu sebesar 13.686 jiwa. Ukuran sampel dihitung dengan menggunakan Rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2} \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana :

- n = Jumlah Sampel
- N = Jumlah Populasi
- e = Batas Toleransi Kesalahan = 0,1 (Berdasarkan tingkat homogenitas populasi)

$$n = \frac{13686}{1 + 13686 \times 0.1 \times 0.1}$$

$$n = \frac{13686}{1 + 13686 \times 0.01}$$

$$n = \frac{13686}{137,86}$$

$$n = 99.27$$

Setelah dihitung telah ditemukan besarnya sampel sebesar 99,27 kemudian dibulatkan ke atas menjadi 100 orang.

Sedangkan metode pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memungkinkan untuk memilih contoh berdasarkan pertimbangan tentang karakteristik yang cocok dalam penelitian ini. Hal yang menjadi pertimbangan pada penentuan sampling ini adalah berdasarkan data sasaran luas tanam padi di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Pengambilan sampel dilakukan pada petani di beberapa desa dengan lahan persawahan yang menggunakan sistem irigasi teknis. Air irigasi di sawah teknis ini mengalir terus menerus sepanjang tahun, sehingga keberadaan sawah ini tidak tergantung pada musim sehingga dalam satu tahun dapat ditanami padi sebanyak dua hingga tiga kali. Dengan demikian kebutuhan pupuk yang digunakan juga tinggi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pekalongan tahun 2011, ada 20 desa dengan jenis sawah beririgasi teknis tersebut. Untuk mempermudah pengambilan sampel penulis membagi wilayah kecamatan Kesesi dalam 5 kelompok berdasarkan letaknya yaitu blok utara, blok selatan, blok timur, blok utara, dan blok tengah. Dari setiap blok diambil 2 desa dengan luas lahan terluas, diantaranya yaitu:

- Blok Utara : Desa Mulyorejo dan Desa Kwigaran
- Blok Timur : Desa Jagung dan Desa Watugajah
- Blok Tengah : Desa Karyomukti dan Desa Kaibahan
- Blok Barat : Desa Sidomulyo dan Desa Kesesi
- Blok Selatan : Desa Brondong dan Desa Kwasen

Kemudian setiap desa tersebut masing-masing diambil 10 responden (petani) sehingga semuanya berjumlah 100 responden sesuai dengan perhitungan menggunakan rumus Slovin.

### Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode analisis sederhana yaitu, metode analisis kuantitatif. Untuk menghitung ketepatan dan kesesuaian indikator harga dan dosis penggunaan pupuk akan dihitung menggunakan rumus berikut ini.

Ketepatan Harga

$$dP = Pr - Pp \dots\dots\dots(3.2)$$

Keterangan :

dP = perbedaan harga (Rp)

Pr = harga yang diterima responden (Rp)

Pp = harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah (Rp)

Kesesuaian Dosis Penggunaan Pupuk

$$dQ = Qr - Qp \dots\dots\dots (3.3)$$

Keterangan :

dQ = perbedaan jumlah (kg/ha)

Qr = jumlah pupuk yang dipergunakan oleh responden (kg/ha)

Qp = jumlah pupuk yang disarankan oleh pemerintah (kg/ha)

Ketepatan harga diukur berdasarkan rumus (3.2). Berdasarkan rumus tersebut dapat dilihat selisih antara harga aktual dengan HET. Setelah itu dilakukan perbandingan antara responden yang membeli pupuk bersubsidi dengan harga sesuai HET dan responden yang membeli pupuk bersubsidi dengan harga tidak sesuai HET. Hasil dari perbandingan responden tersebut ditransformasi dalam bentuk persen. Apabila presentasi tepat harga sama dengan atau lebih besar dari 80 persen maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam penetapan HET sudah sesuai dan berjalan dengan baik, namun apabila hasil yang menunjukkan fakta yang sebaliknya maka kebijakan HET belum berjalan sebagaimana mestinya.

Indikator terakhir dalam penentuan efektivitas kebijakan subsidi pupuk adalah indikator tepat jumlah. Pengukuran tepat jumlah ini berdasarkan selisih antara jumlah aktual dengan jumlah seharusnya yang dijelaskan pada rumus (3.3). Selanjutnya dilakukan perbandingan antara responden yang menggunakan pupuk sesuai dengan anjuran dengan responden yang menggunakan pupuk tidak sesuai anjuran dalam bentuk persen. Apabila persentase responden yang menggunakan pupuk sesuai anjuran sama dengan atau lebih besar dari 80 persen maka dapat dikategorikan efektif pada indikator tepat jumlah. Dari keseluruhan persentase indikator dibuat rata-ratanya dalam bentuk persen. Apabila rata-rata tingkat ketepatan sama dengan atau lebih dari 80 persen maka dapat dikategorikan bahwa kebijakan subsidi pupuk sudah efektif.

Kemudian untuk menentukan besarnya proporsi biaya-biaya yang telah dikeluarkan petani dihitung dengan cara masing-masing dari biaya tersebut dibagi total biaya keseluruhan kemudian dikalikan 100 persen maka akan didapat proporsi biaya produksi dalam bentuk persen. Untuk menentukan besarnya pendapatan bersih yang diterima petani setiap masa panen digunakan penghitungan sederhana dengan mencari selisih antara pendapatan produksi petani dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani, jika dirumuskan akan menjadi formula sebagai berikut.

$$\pi = TR - TC$$

Dimana :  $\pi$  = pendapatan bersih petani  
TR = pendapatan kotor petani  
TC = biaya keseluruhan yang dikeluarkan petani

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Kecamatan Kesesi merupakan kawasan dataran rendah yang berada di Daerah Kabupaten Pekalongan. Batas Kecamatan Kesesi di sebelah utara adalah Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bojong dan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, sedangkan di sebelah selatan Kecamatan Kesesi berbatasan dengan Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Kecamatan Kesesi mempunyai luas wilayah 68,51 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 23 desa dengan jumlah penduduk mencapai 61.777 jiwa pada tahun 2011. Lebih dari 50 % luas wilayah Kecamatan Kesesi merupakan tanah persawahan yaitu 3.531,719 m<sup>2</sup>, sedangkan luas tanah kering 3.404,304 m<sup>2</sup> (Kecamatan Kesesi Dalam Angka, 2011).

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2011**

No.	Lapangan Usaha	Jumlah Penduduk
1.	Pertanian Padi dan Palawija	13.686
2.	Hortikultura	31
3.	Perkebunan	65
4.	Perikanan	51
5.	Peternakan	269
6.	Kehutanan	17
7.	Pertambangan dan Penggalian	390
8.	Industri	4340
9.	Listrik dan Gas	21
10.	Konstruksi	1611
11.	Perdagangan	4337
12.	Hotel dan Restoran	1086
13.	Transportasi	902
14.	Komunikasi	80
15.	Keuangan	75
16.	Jasa Pendidikan	1183
17.	Jasa Kesehatan	223
18.	Jasa Kemasyarakatan	2119
19.	Lainnya	6
<b>Jumlah</b>		<b>30.492</b>

Sumber : Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2011

Dapat dilihat pada Tabel 3 tentang Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Di Kecamatan Kesesi Tahun 2011. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Kesesi.

Luas lahan produksifitas lahan sangat tergantung dengan penggunaan input dan tersedianya sarana prasarana pendukung. Dari segi sarana prasarana pendukung produksi padi kecamatan Kesesi cukup bagus yaitu tersedianya sistem irigasi teknis dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan 73,2 % lahan pertanian di Kecamatan Kesesi merupakan Lahan Persawahan Tehnis.

**Tabel 4**  
**Luas Lahan Tanah Sawah di Kecamatan Kesesi tahun 2011**

No.	Jenis Lahan Persawahan	Luas (m <sup>2</sup> )	Presentase (%)
1.	Tehnis	2.585,327	73,2 %
2.	Semi Tehnis	351,794	9,96 %
3.	Sederhana	178,937	5,06 %
4.	Tadah Hujan	415,661	11,77 %
5.	Pasang Surut	-	-
6.	Lainnya	-	-
7.	Sementara tidak diusahakan	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3.531,719</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2011

Lahan Persawahan Tehnis adalah sawah yang jaringan irigasinya memungkinkan untuk mengukur dan mengatur debit air. Penggunaan jaringan irigasi ini seluruhnya diatur dan dikelola oleh pemerintah. Air irigasi di sawah berpengairan teknis ini mengalir terus menerus sepanjang tahun, sehingga keberadaan sawah ini tidak tergantung pada musim dan dalam satu tahun dapat ditanami padi sebanyak dua hingga tiga kali (Lani Puspita, *et al*, 2005). Hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung tingginya produktifitas sektor Pertanian di Kecamatan Kesesi.

Selain memiliki berbagai keunggulan tersebut input produksi merupakan salah satu penentu dari proses produksi, misalnya pupuk. Semakin luas area persawahan maka kebutuhan pupuk yang digunakan semakin banyak.

**Tabel 5**  
**Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Pekalongan tahun 2012**  
 Satuan Ton

No.	Kecamatan	Urea	ZA	SP-36	NPK	Organik
1.	Kandangserang	824	14	132	35	85
2.	Peninggaran	1.166	11	124	157	156
3.	Lebakbarang	390	1	3	37	13
4.	Petungkriyono	301	1	16	68	19
5.	Talun	871	23	202	334	119
6.	Doro	1.567	95	322	752	231
7.	Karanganyar	1.256	138	607	770	164
8.	Kajen	1.581	901	1.270	2.415	504
9.	<b>Kesesi</b>	<b>2.558</b>	<b>180</b>	<b>689</b>	<b>1.678</b>	<b>348</b>
10.	Sragi	1.670	267	322	1.309	433
11.	Siwalan	1.004	30	154	199	495
12.	Bojong	1.630	215	202	703	114
13.	Wonopringgo	849	80	144	270	125
14.	Kedungwuni	1.096	73	127	205	32
15.	Karangdadap	1.052	100	177	302	392
16.	Buaran	603	1	38	84	13
17.	Tirto	794	206	229	292	29
18.	Wiradesa	912	425	186	781	116
19.	Wonokerto	993	1	80	168	49

Sumber : Departemen Pertanian Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan Tabel 5 jumlah kebutuhan pupuk di Kecamatan Kesesi sebesar 2.558 ton untuk pupuk urea, 180 ton untuk pupuk ZA, 689 ton untuk SP-36, 1.678 ton untuk pupuk NPK (pupuk Majemuk), dan 348 ton untuk pupuk Organik.

### Efektifitas HET Pupuk Bersubsidi

Indikator pertama adalah indikator tepat harga yang diperoleh berdasarkan selisih antara harga yang diterima responden dengan harga yang seharusnya diterima responden. Rata-rata harga pada setiap jenis pupuk bersubsidi yang diterima responden akan dijelaskan pada tabel berikut ini.

**Tabel 6**  
**Harga Pupuk Bersubsidi yang diterima Responden**

No.	Jenis Pupuk	HET Pupuk (Rp/Kg)	Rata-rata Harga Pembelian (Rp/Kg)	Selisih Harga	Presentase Selisih Harga (%)
1.	Urea	1800	1934	134	7,44
2.	SP 36	2000	2268	268	13,4
3.	ZA	1400	1492	92	6,57
4.	NPK	2300	2411	111	4,82
5.	Organik	500	551	51	10,2

Sumber : Data Primer 2013, diolah

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi dan harga pembelian oleh petani. Jenis pupuk yang banyak digunakan petani adalah pupuk jenis Urea, SP 36, ZA, NPK, dan Organik. Pupuk Urea mempunyai Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 1800/kg. Namun pada kenyataannya dalam penelitian ini menemukan rata-rata harga pupuk yang dibeli petani dari pengecer sebesar Rp. 1934/Kg sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 134 dari harga eceran yang ditetapkan pemerintah. Responden telah membeli pupuk urea dengan harga 7,44 persen lebih mahal untuk setiap satu kilogram pupuk dari pada harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

Jenis pupuk lain yang digunakan petani yaitu jenis SP 36, harga eceran tertinggi dari pupuk jenis ini yaitu sebesar Rp. 2000/Kg. Responden rata-rata memperoleh pupuk bersubsidi jenis ini dari pengecer dengan harga sebesar Rp. 2268/Kg atau terdapat selisih harga sebesar Rp. 268/Kg. Dari harga yang diperoleh responden ini maka responden telah membeli pupuk SP-36 dengan harga 13,4 persen lebih mahal untuk setiap satu kilogram pupuk dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Pada pupuk bersubsidi jenis ZA harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 1400/Kg. Responden rata-rata memperoleh pupuk bersubsidi jenis ini dari pengecer dengan harga sebesar Rp. 1492/Kg, selisih harga sebesar Rp. 92/Kg atau 6,57 persen lebih mahal dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Begitu juga pada jenis pupuk NPK dan Organik. Responden membeli pupuk jenis NPK dari pengecer dengan rata-rata harga sebesar Rp. 2411/Kg selisih Rp. 111/Kg atau 4,82 persen dari harga eceran tertinggi. Sedangkan untuk jenis pupuk organik para responden membeli pupuk tersebut dari pengecer dengan harga rata-rata Rp. 551/Kg selisih Rp. 51/Kg atau 10,2 persen dari harga yang ditetapkan pemerintah.

**Tabel 7**  
**Persentase Tingkat Ketepatan Harga Pupuk Bersubsidi**

Jenis Pupuk	Kesesuaian Harga dengan HET	Jumlah	Presentase (%)
Urea	Tepat	26	26
	Tidak Tepat	74	74
SP 36	Tepat	3	5
	Tidak Tepat	57	95
ZA	Tepat	2	7,69
	Tidak Tepat	24	92,31
NPK	Tepat	29	35,8
	Tidak Tepat	52	64,2
Organik	Tepat	24	68,57
	Tidak Tepat	11	31,43
<b>Total</b>	<b>Tepat</b>	<b>84</b>	<b>27,81</b>
	<b>Tidak Tepat</b>	<b>218</b>	<b>72,19</b>

Sumber : Data Primer 2013, diolah

Dari semua jenis pupuk bersubsidi yang digunakan oleh responden semuanya mempunyai kecenderungan yang sama dimana kebanyakan responden memperoleh harga yang lebih tinggi dari HET, dengan persentase sebesar 72,19 persen dibandingkan dengan responden yang memperoleh

harga sama dengan HET yang hanya sebesar 27,81 persen, maka dapat disimpulkan bahwa kajian pupuk bersubsidi pada penelitian ini **belum efektif** menurut indikator tepat harga.

Kecenderungan harga yang lebih tinggi dari HET ini terjadi karena berbagai sebab. Sebab pertama yaitu pembelian petani yang tidak sesuai dengan PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 87/Permentan/SR.130/2/2011, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan yang telah ditentukan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea = 50 kg
- b. Pupuk SP-36 = 50 kg
- c. Pupuk ZA = 50 kg
- d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg
- e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg

Dalam kenyataan di lapangan kepemilikan tanah oleh petani sangat sempit (< 3000 m<sup>2</sup>) sehingga pembelian pupuk oleh para petani hanya dalam skala kecil. Hal tersebut menyebabkan ketidak sesuaian terhadap peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/2/2011 di atas. Dalam peraturan tersebut HET berlaku untuk pembelian pupuk dalam kemasan yang tertulis dalam peraturan tersebut. Namun pada realisasinya pembelian pupuk para petani hanya membeli pupuk sesuai kebutuhan saja, atau dapat disebut dengan istilah *mengecer*. Dengan demikian pembelian dengan cara mengecer tersebut harus membuka segel kemasan yang telah ditetapkan Peraturan tersebut, maka Peraturan Menteri Pertanian tersebut tidak berlaku.

Penyebab yang kedua yaitu adanya pengambilan margin disetiap masing-masing Lini dalam alur distribusi pupuk bersubsidi. Untuk menjalankan fungsinya setiap lini membutuhkan biaya operasional, maka untuk menutup biaya operasional tersebut setiap lini mengambil margin atau selisih dari harga beli pupuk. Berdasarkan hasil analisis rata-rata margin yang diambil distributor dari setiap jenis pupuk bersubsidi yaitu sebesar Rp 107/kg, sedangkan rata-rata margin yang diambil kios pengecer dari setiap jenis pupuk bersubsidi yaitu sebesar Rp 206/kg. Pengambilan margin terbesar yaitu pada jenis pupuk urea. Hal ini disebabkan permintaan pupuk urea yang tinggi dari petani memunculkan peluang margin yang besar, akan tetapi disamping munculnya peluang yang besar akan muncul juga peluang biaya dari proses pemasaran pupuk tersebut, misalnya biaya transport, biaya bongkar, biaya muat, dan lain-lain.

### Dosis Penggunaan Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/40/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah, rekomendasi untuk penggunaan pupuk di kecamatan kesesi adalah sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Rekomendasi Dosis Pupuk di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan**

Kombinasi Pupuk	Acuan Rekomendasi Pupuk (Kg/Ha)					KCL
	Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik	
Dosis Pupuk Tunggal	300	100	-	-	-	50
Dosis Pupuk Majemuk	200	-	-	300	500	-

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 / Permentan / OT.140 / 40/2007

Tabel 9  
Presentase Ketepatan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

Ketepatan Jumlah Pemakaian	Jumlah Responden	Presentase (%)
Sesuai Anjuran	26	26
Tidak Sesuai Anjuran		
Di bawah Anjuran	62	74
Di atas Anjuran	12	
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2013, diolah

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan responden yang menggunakan pupuk sesuai dengan jumlah yang dianjurkan yaitu sebanyak 26 responden, dengan asumsi dosis pupuk yang digunakan petani mendekati acuan dasar pemupukan berimbang, asumsi tersebut digunakan karena berdasarkan hasil wawancara dari 100 responden menunjukkan dosis penggunaan pupuk oleh petani tidak ada yang sesuai sepenuhnya dengan acuan dasar penggunaan pupuk berimbang, sedangkan jumlah responden yang tidak sesuai dengan acuan dasar pemupukan berimbang adalah sebanyak 74 responden yang terdiri dari penggunaan dengan jumlah di bawah anjuran dan di atas anjuran yang masing-masing sebesar 62 dan 12 responden.

Dari hasil wawancara 100 responden menunjukkan bahwa dosis penggunaan pupuk oleh petani tidak ada yang sesuai seutuhnya dengan acuan dasar pemupukan berimbang yang ditetapkan oleh pemerintah, berdasarkan hasil wawancara para petani mengungkapkan bahwa mereka telah memiliki takaran tersendiri tentang penggunaan pupuk. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman yang mereka dapat dari setiap musim tanam, sehingga para petani akan lebih memahami kondisi dan karakteristik masing-masing lahan yang mereka garap.

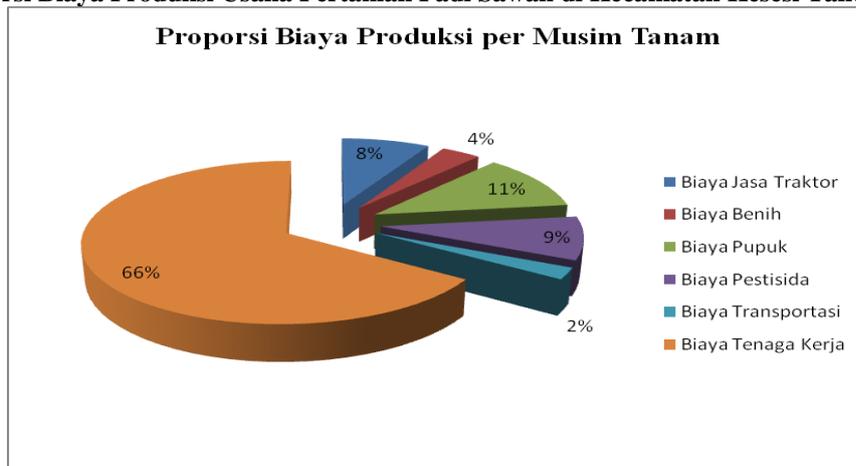
Berdasarkan hal tersebut maka dalam pembuatan peraturan perundang-undangan pemerintah hendaknya melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai kondisi dan karakteristik dari lahan-lahan persawahan produktif, hal tersebut bertujuan agar data yang tercatat sesuai dengan kondisi di lapangan. Akan lebih baik jika penelitian tersebut dilakukan setiap musim atau setiap pergantian musim tanam sehingga perubahan kondisi tanah dapat terpantau. Dengan demikian penentuan acuan dosis penggunaan pupuk akan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dari dua indikator yang sudah dijelaskan di atas menunjuk hasil persentase kedua indikator dapat terlihat bahwa persentase yang menyatakan tepat lebih kecil daripada yang tidak tepat. Selain itu, persentase ketepatan juga tidak lebih besar dari 80 persen sehingga kebijakan subsidi pupuk dikatakan **belum efektif**.

### Analisis Biaya Produksi

Analisis usahatani mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada, secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan pada waktu tertentu. Disebut efektif jika petani (produsen) dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya, serta dikatakan efisien apabila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan output yang melebihi input (Soekartawi, 2002). Dari hasil analisis dalam usahatani pertanian padi terdapat berbagai komponen pembiayaan, yaitu biaya sewa jasa traktor, biaya benih padi, biaya pembelian pupuk, biaya pembelian pestisida, biaya tenaga kerja, dan biaya transportasi.

**Gambar 1**  
**Proporsi Biaya Produksi Usaha Pertanian Padi Sawah di Kecamatan Kesesi Tahun 2013**



Sumber : Data Primer 2013, diolah

Dari Gambar 1 terlihat bahwa biaya produksi dalam satu musim tanam terdiri dari biaya jasa traktor, biaya bibit, biaya pupuk, biaya pestisida, dan biaya tenaga kerja. Dari seluruh biaya produksi tersebut pengeluaran terbesar adalah biaya untuk upah tenaga kerja sebesar 66 persen. Biaya tenaga kerja menjadi pengeluaran petani yang terbesar dalam setiap tahap produksi selalu membutuhkan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja cukup besar. Pengeluaran untuk tenaga kerja setiap harinya yang mencapai Rp 25.000-40.000 per orang. Untuk setiap hari pada tahap-tahap produksi tertentu seperti pada saat tahap tanam, pemupukan, penyiangan dan panen yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja.

Biaya terbesar kedua yaitu biaya pupuk, pupuk menjadi biaya terbesar kedua karena kurang efektifnya kebijakan subsidi pemerintah yaitu dengan penetapan HET. Berdasarkan data masih banyak responden yang membeli harga pupuk bersubsidi dengan harga di atas HET, hal ini akan berakibat pada bertambahnya biaya produksi untuk pembelian pupuk. Pada dasarnya kebijakan subsidi pupuk ini bertujuan untuk membantu petani dalam menyediakan input yang murah, sehingga dapat dijangkau petani yang sebagian besar merupakan petani kecil dengan modal yang terbatas. Adanya subsidi pupuk dapat memengaruhi pengeluaran pupuk yang akan dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 10**  
**Perbedaan Pengeluaran Pupuk Subsidi dan Non Subsidi pada Setiap Musim Tanam**

Jenis Pupuk	Jumlah (Kg)	Harga Pupuk Subsidi (Rp/Kg)	Total Pembelian (Rp)	Harga Pupuk Non Subsidi (Rp/Kg)	Total Pembelian (Rp)
Urea	300	1800	540.000	3500	1.050.000
SP 36	100	2000	200.000	5000	500.000
KCL	50	5600	280.000	5600	280.000
(Non Subsidi)					
<b>Total Pembelian</b>			<b>1.020.000</b>		<b>1.830.000</b>
<b>Selisih Total Pembelian</b>			<b>810.000</b>		

Sumber : Data Primer 2013, diolah

Dari Tabel 10 di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan harga pupuk subsidi dan non subsidi. Perbedaan harga ini akan berpengaruh terhadap pengeluaran pupuk pada setiap musim tanamnya. Pupuk yang digunakan yaitu kombinasi pupuk tunggal sesuai dengan rekomendasi pemupukan berimbang anjuran pemerintah dengan kombinasi penggunaan urea 300 kg, SP 36 100 kg, dan KCL 50 kg untuk setiap satu hektar luas lahan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa untuk pupuk subsidi pemerintah petani dapat mengeluarkan biaya pupuk sebesar Rp 1.020.000 untuk setiap musim tanamnya, sedangkan apabila petani membeli pupuk dengan jenis yang sama tetapi tidak disubsidi pemerintah maka pengeluaran terhadap pupuk sebesar Rp 1.830.000 untuk setiap musim tanamnya. Dari kedua pengeluaran tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan pengeluaran

untuk pupuk subsidi dan non subsidi dengan selisih sebesar Rp 810.000 untuk setiap musim tanamnya. Jadi, apabila petani memperoleh pupuk bersubsidi dari pemerintah maka petani dapat menghemat biaya pengeluaran pupuk sebesar 44,26 persen dari pengeluaran pupuk yang seharusnya dikeluarkan apabila pupuk non disubsidi.

### Analisis Pendapatan Bersih Petani Setiap Musim Tanam

Telah dijelaskan di atas di Kecamatan Kesesi biaya yang biasa dikeluarkan oleh responden diantaranya yaitu biaya tenaga kerja, biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya transportasi. Kemudian untuk mengetahui pendapatan dari hasil produksi yaitu dengan perkalian antara hasil produksi dan harga jual satuan produksi. Selanjutnya untuk mengetahui pendapatan bersih yang diterima responden ditentukan dengan mencari selisih antara pendapatan dari hasil produksi dengan berbagai biaya yang dikeluarkan oleh responden. Akan tetapi untuk menentukan pendapatan bersih yang diterima oleh responden di daerah penelitian akan sulit dihitung secara pasti, hal ini disebabkan oleh sebagian besar hasil produksi responden tidak dijual langsung, mereka lebih memilih untuk menyimpan hasil produksi mereka. Dalam penelitian ini untuk mengetahui pendapatan bersih yang diperoleh petani maka harus menggunakan asumsi, yaitu semua responden menjual seluruh hasil produksinya sesuai dengan harga yang berlaku. Kemudian hasil penjualan tersebut akan disebut sebagai pendapatan kotor responden, untuk mengetahui pendapatan bersih responden maka pendapatan kotor tersebut akan dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan responden untuk proses produksi.

**Tabel 11**  
**Rata-Rata Biaya yang Digunakan dan Pendapatan sekali musim Tanam dari 100 Responden di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan**

Rata-rata luas lahan Garapan (m <sup>2</sup> )	Pengeluaran Responden		Penerimaan Produksi	
	Biaya Rata-rata	Jumlah (Rp)	Rata-rata Hasil Produksi	Jumlah (Kg)
3350,1	Biaya Traktor	196.550	Rata-rata hasil Produksi	1809,7
	Biaya Benih	88.290		
	Biaya Pupuk	274.365	Harga Jual per Kg (Rp)	3500
	Biaya Pestisida	213.470		
	Biaya Tenaga Kerja	1.604.540		
	Biaya Transportasi	56.850		
<b>Total</b>		<b>2.434.065</b>		<b>6.333.950</b>
<b>Pendapatan Bersih Responden</b>			<b>3.899.585</b>	

Sumber : Data Primer 2013, diolah

Berdasarkan tabel 11 menjelaskan rata-rata luas garapan dari 100 responden di Kecamatan Kesesi adalah 3350,1 m<sup>2</sup>. Hasil produksi yang dapat dihasilkan yaitu sebesar 1809,7 Kg, kemudian jika hasil produksi dijual maka harga yang berlaku yaitu sebesar Rp 3500 maka dapat diperoleh pendapatan dari hasil produksi responden sebesar Rp 6.333.950. Sedangkan untuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan responden rata-rata total biaya yaitu sebesar Rp 2.434.065. Kemudian selisih dari pendapatan produksi responden dengan rata-rata total biaya yang dikeluarkan responden tersebut disebut sebagai pendapatan bersih responden. Maka dapat diketahui pendapatan bersih yang akan diterima petani selama satu kali musim tanam dengan luas garapan 3350,1 m<sup>2</sup> yaitu sebesar Rp 3.899.585. Dengan rata-rata luas garapan sebesar 3350,1 m<sup>2</sup> maka untuk mendapatkan pendapatan petani per hektar harus dikalikan 3, sehingga didapatkan luas garapan sebesar 10.050,3 m<sup>2</sup>. Jadi didapatkan pendapatan bersih petani per hektar yaitu Rp 11.698.755.

### KESIMPULAN

1. Rumusan pertama dalam penelitian ini adalah efektivitas kebijakan subsidi pupuk dilihat dari penetapan harga eceran tertinggi (HET). Dalam rumusan masalah ditanyakan apakah harga pupuk bersubsidi yang dibeli petani sudah sesuai dengan HET yang berlaku. Setelah dilakukan penelitian ini diketahui dari 100 responden yang diambil di daerah penelitian 72,19 persen responden membeli pupuk di agen-agen dengan harga yang tidak sesuai HET, sedangkan untuk yang mendapatkan harga sesuai HET sebesar 27,81 persen, maka

- berdasarkan hal tersebut kebijakan subsidi pupuk masih **belum efektif** dalam penetapan harga.
2. Rumusan kedua adalah ketepatan penggunaan pupuk sesuai dengan rekomendasi pemupukan oleh 100 responden di daerah penelitian. Hasil penelitian menunjukan masih banyak penggunaan pupuk oleh responden yang tidak sesuai dengan rekomendasi pemupukan berimbang yang telah ditetapkan. Sebanyak 74 persen responden yang tidak sesuai rekomendasi pemupukan berimbang, 62 persen diantaranya merupakan responden yang penggunaan pupuknya masih di bawah standar rekomendasi dan 12 persen responden penggunaan pupuknya di atas rekomendasi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan kebijakan pupuk bersubsidi masih **belum efektif** berdasarkan indikator tepat jumlah.
  3. Rumusan yang ketiga yaitu berapa besar proporsi pengeluaran petani untuk membeli pupuk. Hasil penelitian menunjukkan struktur biaya usahatani padi sawah irigasi di daerah penelitian meliputi biaya jasa traktor, biaya penggunaan benih, biaya pupuk, biaya obat-obatan atau pestisida, biaya tenaga kerja, biaya angkutan. Proporsi pengeluaran pembelian pupuk sebesar 11 persen. Proporsi tersebut merupakan proporsi terbesar kedua setelah proporsi pengeluaran petani untuk tenaga kerja. Kurang efektifnya kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu penyebab masih tingginya biaya pembelian pupuk oleh petani.
  4. Rumusan yang keempat yaitu berapa besar pendapatan bersih petani dalam sekali musim tanam. Hasil penelitian menunjukkan untuk menghitung pendapatan bersih petani digunakan formula sederhana yaitu dengan mencari selisih antara rata-rata total biaya dari 100 responden dengan rata-rata pendapatan produksi petani. Berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan formula tersebut maka diperoleh rata-rata pendapatan bersih petani dalam sekali musim tanam dengan rata-rata luas garapan sebesar 3350,1 m<sup>2</sup> yaitu sebesar Rp 3.899.585. Dengan rata-rata luas garapan sebesar 3350,1 m<sup>2</sup> maka untuk mendapatkan pendapatan petani per hektar harus dikalikan 3, sehingga didapatkan luas garapan sebesar 10.050,3 m<sup>2</sup>. Jadi didapatkan pendapatan bersih petani per hektar yaitu Rp 11.698.755.

## REFERENSI

- Adnyana, M.O. dan K. Kariyasa. 2000. "Perumusan Kebijakan Harga Gabah dan Pupuk dalam Era Pasar Bebas. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Kabupaten Pekalongan Dalam Angka tahun 2010*. Pekalongan.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Kecamatan Kesesi Dalam Angka tahun 2010*. Pekalongan.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Kecamatan Kesesi Dalam Angka tahun 2011*. Pekalongan.
- Bustanul Arifin. 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Pertanian. 2010. *Data Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Nasional*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Lailly Nuraini. 2007. "Instrument Kebijakan Pupuk Bersubsidi bagi Petani Indonesia". Dalam "DIALOGUE" Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1, Januari 2007.
- Melda R. Sirait. 2008. "Analisis Pemasaran Pupuk Bersubsidi (Urea, ZA, SP-36, NPK Phonska) di Kabupaten Simalungun". Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Negeri Sumatera Utara. Medan: USU Repository.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Soekartawi. 2002. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



- Sri Kasiyati. 2004. "Analisis Dampak Subsidi Harga Pupuk Terhadap Output Sektor Produksi dan Tingkat Pendapatan Rumah Tangga di Jawa Tengah (Pendekatan Analisis I-O dan SNSE Jawa Tengah Tahun 2004)". Dalam Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 6, Nomor 1, Maret 2010, 28-45.
- Toko Pupuk. 2009. "Definisi Pupuk". <http://tokopupuk.net/tag/definisi-pupuk>. Diakses tanggal 26 Februari 2013
- Zulkifli Mantau, dan Faisal. 2007. "Studi Komprehensif Kebijakan Subsidi Pupuk di Indonesia". Dalam Seminar Regional Inovasi Teknologi Pertanian. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara.